



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://jOurnal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

**Metode Context, Input, Process, Dan Product Dalam Evaluasi Program Kerja
Bumdes Desa Sunda Kelapa**

*Context, Input, Process, And Product Methods In The Evaluation Of The Bumdes Work
Program Of Sunda Kelapa Village*

¹⁾Nursanty, ²⁾Achmad Aminudin, ³⁾Kahar Hakim

^{1,2,3} Universitas Bengkulu

nursanty@unib.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan yang saat ini masih diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Salah satu program peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kebijakan untuk membentuk BUMDes pada tiap desa bertujuan agar terciptanya desa yang mandiri yang memiliki kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya yang baik. BUMDes tidak hanya sekedar dibentuk kemudian menjalankan program. Akan tetapi hal lain yang juga penting dilakukan adalah melakukan evaluasi dari pengelolaan BUMDes itu sendiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan serta memberikan pendampingan metode evaluasi program kerja BUMDes yang baik sehingga dapat menemukan kekurangan dari pengelolaan serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil dari program kerja BUMDes. Dalam kegiatan ini BUMDes yang menjadi fokus pendampingan adalah BUMDes pada Desa Sunda Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemberian pengetahuan tentang metode CIPP sebagai suatu metode untuk mengevaluasi program kerja BUMDes. Metode yang digunakan untuk mensosialisasikan ialah dengan cara penyampaian materi dan tanya jawab. Metode ini dirasa sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Sunda Kelapa agar mudah memahami materi yang disampaikan. Pendampingan dilakukan dikarenakan dari hasil kegiatan didapati bahwa evaluasi program kerja BUMDes Desa Sunda Kelapa belum maksimal. Belum maksimal dalam hal ini ialah pada sistem menjalankan program BUMDes yang masih belum sesuai dengan aturan atau mekanisme yang telah diajarkan. Sehingga menyebabkan program BUMDes yang ada tidak berjalan dengan hasil yang maksimal. Pengelola belum terlalu fokus dalam pengelolaan program BUMDes karena sebagian besar pengelola memiliki pekerjaan utama sehingga menjadi pengelola BUMDes dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Pendampingan yang berkelanjutan perlu dilakukan oleh pihak terkait agar BUMDes Desa Sunda Kelapa dapat terkelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci : Pendampingan; BUMDes; CIPP

Abstract

Poverty is a problem that currently still needs solutions to overcome the problem. One of the community welfare improvement programs is the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The policy to form BUMDes in each village aims to create an independent village that has the welfare and good economy of its people. BUMDes are not just formed and then run the program. However, another thing that is also important to do is to evaluate the management of BUMDes itself. The purpose of this activity is to socialize and provide assistance in the evaluation method of a good BUMDes work program so that it can find shortcomings of management and opportunities that can be used to improve the results of the BUMDes work program. In this activity BUMDes which became the focus of assistance is BUMDes in Sunda Kelapa Village, Central Bengkulu Regency. Providing knowledge about the CIPP

method as a method to evaluate bumdes work programs. The method used to socialize is by way of material delivery and Q&A. This method is considered in accordance with the conditions of the people in Sunda Kelapa Village to easily understand the material delivered. Assistance was carried out because from the results of activities it was found that the evaluation of the BUMDes work program of Sunda Kelapa Village had not been maximized. Not yet the maximum in this case is in the system running bumdes program that is still not in accordance with the rules or mechanisms that have been taught. Thus causing the existing BUMDes program not to run with maximum results The manager has not been too focused on managing the BUMDes program because most managers have the main job so that being a BUMDes manager is considered a side job. Sustainable assistance needs to be done by related parties so that BUMDes Sunda Kelapa Village can be managed properly so as to improve the welfare of its people.

Keywords : Assistance; BUMDes; CIPP

Submitted : 21-03-2022, Revision : 02-04-2022, Accepted : 08-04-2022

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi fenomena aktual yang mendapat perhatian banyak pihak. Berbagai kebijakan dan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah semenjak era Orde Baru hingga Pemerintahan sekarang, bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Murdiyana dan Mulyana, 2017).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan pada ayat 4 pasal 1 dan 2 bahwa desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa dengan mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumberdaya alam di desa; sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (peraturan.bpk.go.id).

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes dibuat untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pendirian, pengurus dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes (peraturan.bpk.go.id). Selain itu dituangkan dalam Peraturan Desa Sunda Kelapa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sunda Kelapa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa (Arsip Desa, 2017).

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri, agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan (Chambers, 2008).

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh BUMDes di beberapa daerah, ada BUMDes yang bangkrut karena pengurus atau pengelola BUMDes yang tidak berkomitmen atau karena usaha yang gagal, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keuntungan yang kecil, dan berbagai persoalan lainnya. Sebagaimana yang terjadi di BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran Kabupaten Bogor, dimana BUMDes Harapan Jaya tahun 2015-2016 mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh tidak adanya komitmen pengurus. Kemudian pada tahun 2017 pelaksanaan BUMDes Harapan Jaya mencanangkan dibentuk 6 unit usaha dan hingga akhir 2018 yang dapat terealisasi hanya 4 unit usaha. Keempat unit usaha yang berjalan belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Pagelaran, karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha tersebut hanya 20 orang. Omzet BUMDes sudah bagus namun profit yang diperoleh sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa. (Hidayah, 2019)

Persoalan serupa juga dialami oleh BUMDes Sungai Ungar Utara Kabupaten Karimun, dimana program kerja BUMDes belum mampu untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat Desa Sungai Ungar Utara. Jenis usaha yang dapat terealisasi hanya 1 (satu unit) yaitu simpan pinjam. Satu program BUMDes Sungai Ungar Utara yang dapat terlaksana belum mampu berjalan dengan baik dan mengalami kemacetan sejak akhir tahun 2015. Program BUMDes Sungai Ungar Utara belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Sungai Ungar Utara. Hal ini karena belum mampu menjadi wadah pembelajaran masyarakat untuk berusaha dan membuka lapangan pekerjaan. (Silvana, 2016)

BUMDes Mitra Usaha adalah BUMDes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Sunda Kelapa di Kabupaten Bengkulu Tengah. BUMDes ini telah melaksanakan beberapa kegiatan usaha di sektor jasa, perdagangan, dan peternakan. Kegiatan usaha tersebut adalah sewa kursi, sewa tenda, ternak sapi, pinjaman, pupuk. Kegiatan-kegiatan usaha tersebut tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat desa namun belum maksimal. Unit-unit usaha berjalan biasa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang belum terlalu antusias. Selain itu usaha hewan ternak sapi pun belum berjalan dengan baik sehingga ternak sapi harus dijual kembali. Pengurus BUMDes juga merasa kesulitan dalam mencari gagasan kegiatan BUMDes yang dapat bermanfaat secara maksimal dan dalam skala atau tingkat yang luas dari usaha sewa menyewa kursi dan tenda. Hal ini diungkapkan oleh pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa Sunda Kelapa.

Permasalahan yang dialami adalah bahwa pengurus BUMDes Mitra Usaha di Desa Sunda Kelapa, belum mengelola dan mengembangkan BUMDes yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hal ini dikarenakan pengurus BUMDes belum mampu mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan, potensi, dan peluang yang bisa dikembangkan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan atau dilaksanakan oleh Nursanty, S.IP., M.Si selaku ketua pengabdian dan didampingi oleh 2 orang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh 35 orang, yang terdiri dari tim pengabdian, pengelola BUMDes, karang taruna, pengelola Desa, serta masyarakat Desa Sunda Kelapa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di aula kantor Desa Sunda Kelapa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu ceramah, pelatihan dan pendampingan. Adapun ketiga cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyampaian Materi/Ceramah

Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini secara umum terbagi menjadi dua materi pokok, yaitu materi tentang BUMDes dan materi tentang metode evaluasi CIPP. Sebagai kegiatan pembuka, materi tentang BUMDes perlu disampaikan pada khalayak sasaran kegiatan beserta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan BUMDes di tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk menanamkan akan arti pentingnya keberadaan BUMDes dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya persamaan pemahaman ini dapat membangun komitmen semua pihak untuk dapat mendukung dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes di Desa Sunda Kelapa. Selain itu juga diberikan/ditampilkan juga contoh BUMDes yang sudah sukses supaya bisa menjadi inspirasi dan menumbuhkan semangat bagi masyarakat Desa Sunda Kelapa untuk mengoptimalkan keberadaan BUMDes.

Setelah penyampaian materi tentang BUMDes, kegiatan dilanjutkan dengan materi evaluasi program BUMDes dengan metode CIPP. Materi kegiatan pelatihan ini disampaikan pada khalayak sasaran kegiatan yaitu para pengurus BUMDes Mitra Usaha di Desa Sunda Kelapa. Metode evaluasi CIPP ini diharapkan mampu membantu pengurus BUMDes dalam mengenali kondisi BUMDes termasuk kelemahan dan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui BUMDes. Setelah mendapatkan materi tentang metode evaluasi CIPP, pengurus BUMDes diarahkan untuk mempraktekkan atau melaksanakan evaluasi dengan melibatkan unsur pemerintahan desa dan masyarakat pada umumnya.

2. Pendampingan

Pendampingan dalam kegiatan ini dilakukan dengan mendampingi khalayak sasaran dalam melakukan evaluasi terhadap program BUMDes. Tim pengabdian akan mendampingi khalayak sasaran dalam mengidentifikasi dan menemukan kondisi BUMDes secara sistematis dengan menggunakan metode CIPP yang meliputi konteks, input, proses, dan produk dari BUMDes Mitra Usaha. Pendampingan dilakukan dengan memberikan petunjuk secara teknis dalam pengevaluasian karena secara substansi yang mengenali kondisi BUMDes dengan baik adalah mereka yang terlibat kegiatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah tahapan kegiatan pengabdian dilakukan, berikut adalah hasil evaluasi kegiatan pengabdian berdasarkan tahapan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Tingkat pemahaman kelompok sasaran, dalam hal ini adalah pengurus BUMDes secara khusus, perangkat desa dan masyarakat Desa Sunda Kelapa pada umumnya, belum mengetahui dan menerapkan evaluasi dengan menggunakan metode tertentu, evaluasi dilakukan pada mekanisme pelaksanaan program dan capaian hasilnya. Pembicaraan tentang kesulitan dan kendala yang dihadapi memang dibicarakan namun belum didokumentasikan. Setelah disampaikan materi tentang evaluasi dengan menggunakan metode CIPP, kelompok sasaran pada akhirnya mengetahui bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada hasil tetapi juga pada beberapa aspek lainnya, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Dengan menggunakan metode evaluasi CIPP ini kelompok sasaran mampu mengidentifikasi kelemahan, kekuatan dari segala segi pengelolaan, sarana dan alat yang dimiliki, potensi sumber daya manusianya, dana dan sumber dana yang ada, dan produk yang sudah dijalankan. Dengan hasil identifikasi tersebut, dapat dijadikan dasar dalam penentuan rencana perbaikan dan pengembangan ke depan. Dengan diketahuinya kondisi internal dari BUMDes akan diketahui kemampuan dan potensi yang bisa dikembangkan.
2. Setelah mengetahui cara mengevaluasi dengan menggunakan metode CIPP, kelompok sasaran kemudian mulai mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan aspek evaluasi dalam CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Selama ini evaluasi yang dilakukan hanya pada hasil pelaksanaan program yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam pertemuan rutin dengan pengurus BUMDes. Dalam pertemuan tersebut membahas mekanisme program yang dijalankan dan hasilnya, terutama program simpan pinjam, karena program ini yang kegiatannya berkelanjutan, evaluasinya membahas siapa yang mengangsur, siapa yang menunggak, siapa yang pinjam baru, dan sebagainya. Untuk program BUMDes Mitra Usaha lainnya juga dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti usaha sewa tenda dan kursi, ternak sapi, dan penjualan pupuk.
3. Kesulitan yang dihadapi dalam proses evaluasi lebih kepada waktu pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan dan hasil evaluasi. Pembicaraan terkait kemampuan pengurus, kendala pelaksanaan program, dan beberapa hal lainnya memang sudah dibahas dikalangan pengurus dan melibatkan perangkat desa, tetapi tidak dituangkan dalam rumusan dokumen tertentu. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah pengunduran diri dari ketua pengurus BUMDes, sehingga Kepala Desa Sunda Kelapa menunjuk Plt secara langsung untuk meneruskan sampai akhir periode sampai dilakukan pemilihan pengurus yang baru. Plt Ketua BUMDes telah menyusun Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mitra Usaha dan sudah mulai menyusun program kerja meskipun belum tuntas. Saat kegiatan pengabdian ini dilakukan (bulan Oktober tahun 2021), pengurus BUMDes Mitra Usaha Desa Sunda Kelapa sudah mempunyai susunan dan anggota pengurus baru.

Evaluasi terhadap BUMDes Mitra Usaha Desa Sunda Kelapa berdasarkan informasi dari pengelola periode tahun 2020, dilakukan secara intern dan ekstern. Secara intern evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali, evaluasi ini dilakukan dalam pertemuan rutin yang diadakan untuk membahas pelaksanaan sistem kerja. Dalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah mekanisme pelaksanaan program dan hasilnya, hasilnya adalah berupa laporan-laporan atau catatan keuangan. Laporan atau catatan ini terdokumentasi tetapi belum ditata secara sistematis.

Selain evaluasi secara intern tersebut, BUMDes juga dievaluasi oleh pihak kabupaten atau pendamping yang pelaksanaannya juga dilakukan setiap tiga bulan sekali. Evaluasi ini dilakukan dengan memeriksa dan mengkoreksi yang dilakukan oleh BUMDes baik secara teknis maupun secara substantif.

Kedua evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau apa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Artinya evaluasi yang dilakukan merupakan koreksi dan rekomendasi tindakan perbaikan. Evaluasi dengan menggunakan metode CIPP mengidentifikasi bukan hanya pada proses pelaksanaannya saja melainkan juga pada aspek kontek yang meliputi kekuatan dan kelemahan BUMDes Mitra Usaha, aspek input yang meliputi sumberdaya BUMDes baik sumber daya manusia dan finansial, aspek proses yang meliputi data-data penilaian dan pelaksanaan hasil koreksi, dan aspek produk yang melihat ketercapaian dan keberhasilan program BUMDes.

Kelebihan pengelolaan BUMDes yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sudah tersedia support dana pengembangan BUMDes di APBDes dari Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Adanya komitmen dari pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDes, dan
3. Sudah pernah melakukan studi banding ke objek wisata Umbul Ponggok sebagai usaha yang di kelola oleh BUMDes di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
4. Telah memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga BUMDes
5. Dokumen tersedia lengkap meskipun belum disusun secara sistemik
6. Sudah terdapat beberapa unit usaha yang dijalankan seperti sewa tenda dan kursi, simpan pinjam, ternak sapi, penjualan pupuk.
7. Mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil dari tanaman pohon kelapa yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha

Sedangkan, kelemahan teridentifikasi selama proses diskusi adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya komitmen bersama dari pengelola BUMDes
2. Belum ada kesepahaman dengan masyarakat desa terhadap program-program BUMDes
3. Belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan BUMDes

4. Belum adanya keberanian dari pengelola BUMDes untuk berinovasi melakukan pengembangan program usaha BUMdes
5. Pengelola BUMDes yang belum maksimal mencurahkan waktu dan perhatiannya ke pengelolaan BUMDes dikarenakan aktivitas pekerjaannya sehari-hari
6. Belum mampu melihat potensi dan peluang yang ada di Desa
7. Belum tersusunnya dokumen-dokumen dengan rapi dan sistemik
8. Belum mempunyai sarana dan fasilitas pendukung yang memadai

SIMPULAN

Hasil dari kegiatan yang dilakukan adalah masih minimnya pemahaman pengelola BUMDes dalam memaksimalkan tujuan dari adanya BUMDes itu sendiri. Tercapai tidaknya suatu tujuan organisasi juga didapati dari hasil evaluasi yang dilakukan. Selama ini evaluasi yang dilakukan oleh pengelola hanya sebatas evaluasi dari pelaksanaan program unit usaha BUMDes. CIPP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program kerja BUMDes secara menyeluruh, sehingga evaluasi yang dilakukan dapat mengetahui potensi dan peluang yang ada melalui pengelolaan BUMDes secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto dan Cepi Safruddin Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chambers, R. 2008. *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxam – Kanisius. Yogyakarta
- Hidayah, Ulul. 2019. *Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor*. *JSHP Vol. 3, No. 2, ISSN: 2580-5398*.
- Murdiyana dan Mulyana. 2017. *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Politik Pemerintahan*. Vol 10 No. 01, Agustus 2017, 73-96
- Peraturan Desa Talang Babatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Babatan Serasan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Silvana, Eva. 2016. *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Tahun 2015*. *Jurnal Umrah*.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Wahyudin, Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.*
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.